

---

## Konstruksi Sosial dan Politik dalam Dinamika Perang Dagang AS-Tiongkok

Indyra Putri Ramadhani<sup>1</sup>, Lutfia Firdaus<sup>2</sup>, Muhammad Daru Wissha<sup>3</sup>, Muhammad Fajar Maliki<sup>3</sup>, Fathir Bagus Maulana<sup>4</sup>

Universitas Al Azhar Indonesia  
E-mail: indyra.putriramadhani@gmail.com

---

### Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 04 Februari 2026

**Keywords:** Trade War, United States and Tiongkok, Social and Politic Construction, Trade Norms

**Abstract:** *The trade war between the United States and Tiongkok is one of the most significant global economic phenomena today, as it reflects not only economic rivalry but also deeper geopolitical tensions (Zeng, Li, & Tan, 2022; Grosse, Lu, & Shenkar, 202, p. 598). This conflict not only has an impact on the stability of international trade, but also reflects structural tensions in bilateral relations between the two countries. The protectionist policies, economic sanctions and technological restrictions imposed show the role of social construction and economic identity in the direction of national trade policy. This research aims to analyze how the United States and Tiongkok trade war is constructed through political and economic debates, as well as evaluating its impact on international trade standards. The method used is a descriptive explanative approach, with secondary data collection from various sources such as books, journal articles, online publications, and official reports from relevant institutions. The research results show that the trade war between the United States and Tiongkok does not only reflect economic competition, but is also used as a political instrument in forming new norms in the global trade order. This conflict has also triggered changes in the dynamics of economic alliances and influenced international trade policy more broadly, with the potential to change the structure of the world economy in the future.*

---

### PENDAHULUAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan salah satu dinamika paling signifikan dalam perekonomian dan politik global pada dekade terakhir. Perselisihan yang mulai memanasi sejak 2018 ini bukan sekedar soal saling menaikkan tarif impor, melainkan juga mencerminkan persaingan yang lebih luas dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pengaruh global (Badea, 2021, hlm. 109).

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengambil langkah

tegas dengan memberlakukan tarif tinggi terhadap ratusan miliar dolar produk asal Tiongkok. Langkah ini segera dibalas oleh Tiongkok dengan kebijakan serupa terhadap produk-produk Amerika. Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat sejak 2018 guna memperbaiki neraca dagang Amerika Serikat dan merupakan langkah awal perang dagang dimulai (Isnaini & Widiyanto Akbar, 2024, hlm.3) . Tiongkok merespon kebijakan tersebut dengan melakukan tindakan balas tarif yang keras.

Konflik ini berkembang menjadi saling balas kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian di pasar global, mengganggu rantai pasok internasional, dan berdampak pada harga-harga komoditas. Pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara saja, tetapi juga menyebar ke negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang erat dengan AS dan Tiongkok, termasuk Indonesia (Zeng, Li, & Tan, 2022, p. 350).

NGO dan lembaga lintas negara mengambil peran proaktif dalam mengawasi dampak sosial-ekonomi perang dagang, terutama dalam mendorong penerapan prinsip ESG dan perlindungan terhadap hak pekerja serta lingkungan (Sha, 2021, hlm. 92; IMF, 2023, hlm.5). Banyak yang mendorong praktik ESG lebih ketat, memastikan perusahaan tidak mengorbankan standar pekerja, lingkungan, maupun tata kelola. Studi Melyana & Shinta (2025) menekankan bahwa perusahaan yang menghadapi ketidakpastian geopolitik meningkatkan diversifikasi pemasok, cadangan stok, dan rencana kontinjensi guna menjaga ketahanan rantai pasok. Ini juga tercermin dalam pembentukan kesepakatan regional seperti RCEP, yang bertujuan menstabilkan aliran dagang di kawasan Asia-Pasifik.

Lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan IMF memakai risiko geopolitik sebagai parameter dalam memproyeksikan perlambatan pertumbuhan dan volatilitas. Mereka juga merekomendasikan aset safe-haven (emas, obligasi hijau, minyak) dalam strategi portofolio. Su et al. (2021, p.14) menunjukkan bahwa emas dan perak menjadi pelindung efektif saat geopolitis tinggi, sedangkan minyak digunakan oleh negara pengeksport untuk meredam tekanan cadangan.

Penelitian Zeng et al. (2022, p. 350) menyebut fenomena “partial decoupling”: AS-based firms spesifik memindahkan sebagian operasi ke ASEAN (Vietnam, Indonesia), tapi tetap mempertahankan basis di China. Ini didukung oleh strategi peningkatan reseller global serta laba yang dikonsolidasikan, dibandingkan relokasi penuh.

Selain itu, perusahaan teknologi seperti Apple, Qualcomm, dan Intel mengimplementasikan strategi eksport dual-track untuk menyesuaikan diri dengan regulasi ekspor AS, terutama dalam konteks semikonduktor dan teknologi sensitif (Chen & Liu, 2024, p. 2; Sautman, 2021, p. 125). Di sisi China, Huawei dan ByteDance mempercepat investasi R&D, termasuk dalam chip domestik dan AI, untuk mengurangi ketergantungan impor AS.

Secara finansial, perusahaan memperkuat neraca kas. Studi Guizani et al. (2022, p. 6) menemukan bahwa perusahaan dengan cadangan kas tinggi lebih siap menghadapi ketidakpastian pasar, meski berpotensi kebijakan yang memicu konflik agensi.

Selain perang dagang yang terjadi antara kedua negara tersebut, Amerika dan Tiongkok terlibat dalam persaingan teknologi khususnya pada bidang *artificial intelligence*. Kedua negara ini memiliki perkembangan *AI* yang sangat pesat, sehingga terjadi persaingan antara kedua negara tersebut dalam bidang teknologi. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, Qualcomm, Huawei, ByteDance, Alibaba, bersaing dalam pasar global pada bidang teknologi (Segal, 2022a, hlm. 36).

Perkembangan *AI* yang semakin pesat ini, membuat persaingan antara kedua negara menjadi semakin luas, banyak kebijakan yang dibuat kedua negara untuk mempertahankan identitas kedua negara yang sudah ada berdekade-dekade lamanya. Selain itu, diplomasi yang

intens merupakan cara kedua negara tetap menjalin persahabatan antar kedua negara meski sedang terlibat perang dagang (Segal, 2022a, hlm. 38).

Konstruktivisme dalam studi hubungan internasional memandang bahwa aspek-aspek penting dalam hubungan antarnegara termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Dalam konteks ini, Tiongkok menjadi subjek sosial utama yang mengalami transformasi identitas masyarakat akibat tekanan eksternal, sementara Amerika Serikat berperan sebagai subjek politik yang membentuk narasi strategi melalui kebijakan dan media (Sha, 2021, p. 95; Chen & Liu, 2024, p. 3). Realitas politik dunia dibentuk oleh gagasan, norma, identitas, dan persepsi, bukan sekedar oleh faktor material seperti ekonomi atau kekuatan militer.

Dengan kata lain, konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kekuatan materi semata, tetapi juga oleh konstruksi sosial, identitas, serta nilai-nilai yang terbentuk melalui interaksi kedua negara. Dalam konteks ini, perang dagang AS-Tiongkok dapat dipahami sebagai hasil dari persepsi, norma, dan identitas yang dibangun oleh kedua pihak selama berdekade-dekade hubungan bilateral mereka (Wendt, 1999, p. 251).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perang dagang AS-Tiongkok dengan pendekatan konstruktivisme, menelaah bagaimana konstruksi sosial dan identitas nasional membentuk kebijakan kedua negara, serta implikasi dari dinamika perang dagang terhadap hubungan internasional dan perekonomian global. Dengan metode penelitian kualitatif eksplanatif, dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, publikasi daring, serta laporan resmi lembaga yang relevan (Creswell, 2014, p. 4). Peneliti menyajikan kajian perang dagang AS-Tiongkok dari sudut pandang konstruktivisme yang menghasilkan pembahasan identitas nasional sebagai konflik, politik diskursus dan konstruksi kepentingan, hingga teknologi sebagai arena simbolik perang dagang AS-Tiongkok.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan eksplanatif sebagai metodenya. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang bagaimana konstruksi sosial dan politik muncul sebagai akibat dari dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap data kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat yang kompleks (Creswell, 2014).

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian literatur dan dokumentasi seperti artikel jurnal, buku akademik, laporan institusional, dan publikasi media yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan konstruksi sosial dan politik konflik dagang (Sugiyono, 2013).

Analisis isi adalah teknik analisis yang digunakan. Tujuan analisis ini adalah untuk menginterpretasikan makna teks secara sistematis menggunakan kerangka teori konstruktivisme. Analisis ini dilakukan dengan memeriksa narasi, simbol, dan representasi yang muncul dalam dokumen untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana identitas, persepsi, dan norma muncul dalam konteks konflik dagang antara dua negara (Creswell, 1997).

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi akademik dan institusional yang kredibel. Selain itu, analisis dilakukan secara konsisten menggunakan kerangka teori yang sama, yang memungkinkan peneliti lain untuk menguji dan mengembangkan kembali temuan penelitian (Sugiyono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak 2018, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya masalah tarif atau ketidakseimbangan perdagangan; itu adalah bukti pergeseran struktur kekuasaan di seluruh dunia. Studi Lee & Zulkefli (2021) dari *Journal of International Studies* menggunakan pendekatan kualitatif terhadap laporan, dokumen resmi, dan pidato untuk menunjukkan bahwa konflik ini dipicu oleh upaya AS untuk mempertahankan hegemoni globalnya, bukan hanya karena tarif atau tindakan dagang.

Schmid (2019) mencatat dalam konteks keamanan ekonomi bahwa Tiongkok menggunakan kekuatannya atas bahan langka (tanah langka) sebagai alat tekanan strategis. Taktik ini baru-baru ini muncul kembali dalam eskalasi terakhir. Studi yang dilakukan oleh CSIS dan Federal Policy Research Institute menunjukkan bahwa pasokan pertahanan AS akan dipengaruhi secara langsung oleh pengendalian ekspor bumi asing oleh Tiongkok sejak 2025, terutama untuk sistem seperti radar dan jet tempur generasi baru.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya masalah ekonomi; itu juga melibatkan perselisihan tentang identitas, persepsi, dan konstruksi makna untuk kepentingan nasional. Menurut pendekatan konstruktivisme, kepentingan negara dibangun melalui interaksi, diskusi, dan struktur identitas antarnegara, bukan secara alami. Dalam situasi seperti ini, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan, mendiskusikan, bahkan mendefinisikan posisi mereka dalam struktur internasional (Wendt, 1999, p. 251).

### **Identitas Nasional Sebagai Konflik**

Dalam perspektif konstruktivisme, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya dapat dijelaskan sebagai perselisihan ekonomi yang bersifat rasional, melainkan sebagai pertemuan antar identitas nasional yang terbentuk melalui narasi politik, sejarah, dan persepsi sosial. Menurut konstruktivisme, negara-negara tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan material yang objektif, melainkan juga berdasarkan identitas yang dibangun melalui interaksi sosial (Wendt, 1999). Dalam konteks ini, AS berperan sebagai subjek politik yang membentuk citra Tiongkok sebagai ancaman simbolisme dan wacana media, sementara Tiongkok menjadi subjek sosial yang mengalami transformasi identitas masyarakat akibat tekanan eskternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Zeng et al. (2022) menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua negara tersebut tidak hanya berdampak pada tarif dan arus perdagangan, tetapi juga paling memukul sektor-sektor yang sangat bergantung pada *supply chain* global. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas sebagai “mitra dagang strategis” tidak cukup kuat untuk meredam dampak negatif dari narasi konflik yang terus terbentuk melalui media dan kebijakan luar negeri. Narasi mengenai persaingan sistemik antara AS dan Tiongkok, sebagaimana sering disorot oleh media seperti *New York Times* dan *Wall Street Journal*, menciptakan persepsi bahwa relasi kedua negara bersifat konfrontatif, meskipun hubungan ekonomi masih berlangsung.

Di sisi Tiongkok, transformasi identitas masyarakat terlihat jelas dalam studi Wenbiao Sha (2021), yang menemukan bahwa warga di daerah yang lebih terdampak oleh perdagangan dengan AS mengalami penurunan tingkat kepercayaan terhadap Amerika serta peningkatan sentimen nasionalisme setelah perang dagang dimulai. Identitas kosmopolitan yang sebelumnya terbentuk melalui keterbukaan terhadap perdagangan dan budaya global mulai tergantikan oleh identitas nasionalistik yang memandang AS sebagai ancaman terhadap kehormatan bangsa. Temuan ini mempertegas bahwa identitas sosial bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan signifikan ketika suatu negara menghadapi tekanan atau serangan simbolik dari pihak luar.

Sha (2021) menggunakan teori identitas sosial untuk menjelaskan bahwa individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok yang memiliki status lebih tinggi dan nilai-nilai yang dirasakan dekat (prototypical distance). Ketika identitas sebagai kelompok “pro-AS” mengalami penurunan status akibat sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan kampanye seperti anti-Huawei, masyarakat pun beralih pada identitas nasionalistik yang dirasakan lebih protektif dan memberi rasa kebersamaan.

Dalam kerangka konstruktivisme, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi seperti tarif bukan hanya berdampak secara material, melainkan juga turut membentuk ulang struktur sosial dan identitas kolektif. Identitas nasional tidak hanya menjadi sumber potensi konflik, tetapi juga menjadi instrumen mobilisasi sosial dan legitimasi politik—baik di AS maupun di Tiongkok (Sha, 2021, p. 95).

### **Politik Diskursus dan Konstruksi Kepentingan**

Kepentingan negara dalam konstruktivisme adalah hasil dari konstruksi sosial, yang dibentuk melalui diskusi, simbol, dan interaksi antara orang. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bagaimana kedua negara secara aktif membuat, menyebarkan, dan mempertahankan suatu narasi tertentu yang bertujuan untuk membentuk kacamata publik dan mendukung kebijakan ekonomi mereka (Chen & Liu, 2024, p. 3).

Penelitian Zeng et al. (2022) dalam *Business and Politics* menggarisbawahi bahwa tensi geopolitik dan ekonomi antara AS–Tiongkok bukan hanya termanifestasi dalam aksi kebijakan seperti tarif, namun juga tercermin dalam sentimen negatif media arus utama AS seperti *New York Times*, *Wall Street Journal*, dan *Washington Post*. Melalui Analisa media, ditemukan bahwa peningkatan diskursus negatif berhubungan langsung dengan penurunan volume impor AS dari Tiongkok, terutama di sektor-sektor dengan integrasi *supply chain* global yang tinggi. Ini membuktikan bahwa narasi yang dibentuk oleh media membentuk ekspektasi aktor pasar dan mendorong redefinisi kepentingan ekonomi berdasarkan persepsi risiko politik, bukan hanya pertimbangan material.

Jika dilihat dari sisi Tiongkok, dalam studi Wenbiao Sha (2021) menunjukkan bahwa perang dagang secara langsung memicu perubahan dalam diskursus identitas dan kepentingan nasional. Melalui teori konstruktivis identitas sosial, dijelaskan bahwa sebelum perang dagang, warga Tiongkok di wilayah dengan keterbukaan perdagangan tinggi cenderung memiliki identitas kosmopolitan dan lebih percaya pada Amerika. Namun, diskursus yang berkembang pasca-2018 secara aktif menggantikan identitas tersebut dengan nasionalisme, didorong oleh representasi media domestik dan propaganda pemerintah yang menggambarkan AS sebagai agresor yang merugikan kepentingan nasional.

Fenomena ini secara teoritis sejalan dengan gagasan Alexander Wendt bahwa "kepentingan negara dikonstruksi melalui proses sosial", yang mencakup makna politik dan representasi simbolik. Realitas kepentingan dibentuk oleh diskusi yang terjadi di lingkungan publik dan lembaga negara, baik di Amerika Serikat maupun Tiongkok. Amerika Serikat menunjukkan dirinya sebagai pelindung industri dalam negeri dan korban praktik curang Tiongkok, sementara Tiongkok menunjuk dirinya sebagai pihak yang teraniaya dan terpaksa bertahan (Wendt, 199, p. 251; Sha, 2021, p. 95).

Diskursus ini memiliki tujuan ganda. Pertama, itu berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi di dalam negeri; kedua, itu berfungsi sebagai sinyal politik ke komunitas internasional. Selama pemerintahan Trump dan Biden, cerita "decoupling" dan "kompetisi strategis" diciptakan di Amerika Serikat untuk mendukung konsumsi domestik dan mendukung

kolaborasi teknologi dan pengendalian ekspor dengan sekutu mereka (Chen & Liu, 2024). Sebaliknya, cerita tentang "kedaulatan ekonomi" dan "perjuangan nasional" Tiongkok digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan sebagai cara untuk menentang sistem perdagangan global yang dianggap tidak jujur.

Sesuai dengan studi Zeng et al. (2022), analisis ini diperkuat dengan temuan bahwa meskipun banyak industri AS telah memiliki "sunk costs" yang besar di Tiongkok, framing negatif yang terus menerus dalam media dan politik menyebabkan aktor bisnis mempertimbangkan ulang posisi mereka dalam *supply chain* global. Di sini tampak jelas bahwa konstruksi kepentingan melalui diskursus lebih memengaruhi perilaku ekonomi daripada kepentingan objektif itu sendiri. Diskursus menjadi arena perebutan makna dan legitimasi dalam hubungan internasional.

### **Dampak Sosial dan Budaya**

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan selain sektor ekonomi dan politik. Dalam menanggapi tekanan dari luar, nasionalisme Tiongkok meningkat. Identitas masyarakat di daerah yang terkena dampak kebijakan perdagangan AS berubah dari kosmopolitan menjadi nasionalis, menurut penelitian Sha (2021). Ini diperkuat oleh berita di dalam negeri yang menggambarkan Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan kehormatan negara.

Di sisi lain, masyarakat Amerika juga mengalami perubahan persepsi terhadap Tiongkok. Diskursus publik yang dibentuk oleh media dan elite politik memperkuat stereotip negatif terhadap Tiongkok, yang berdampak pada meningkatnya ketegangan sosial, termasuk diskriminasi terhadap komunitas Asia-Amerika. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik ekonomi dapat memperdalam polarisasi budaya dan memperkuat batas-batas identitas sosial (Sha, 2021, p. 95).

Perang dagang juga memengaruhi preferensi budaya dan pola konsumsi. Strategi budaya resistensi Tiongkok termasuk mendukung produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri. Konsumen di Amerika Serikat cenderung tidak menggunakan barang-barang buatan Tiongkok karena dominasi teknologi Tiongkok dan kekhawatiran keamanan data. Oleh karena itu, perang dagang telah menjadi katalisator untuk perubahan sosial di luar ranah ekonomi (Segal, 2022a, p. 38).

Kebijakan media dan pendidikan juga mencerminkan perubahan ini. Kurikulum pendidikan Tiongkok mulai menekankan kemandirian teknologi dan kebanggaan nasional. Media massa secara aktif menceritakan bahwa mengandalkan Barat adalah kelemahan. Di Amerika Serikat, perdebatan tentang "Made in America" muncul kembali, mendorong proteksionisme kebijakan dan mendukung industri lokal. Simbol budaya digunakan di kedua negara untuk memobilisasi masyarakat dan menciptakan identitas mereka sendiri (Segal, 2022a, p. 38).

Secara keseluruhan, konsekuensi sosial dan budaya dari perang dagang menunjukkan bahwa persepsi publik dan identitas sosial memengaruhi kebijakan ekonomi. Kebijakan luar negeri dan hubungan internasional dipengaruhi oleh konflik yang memperkuat batas-batas sosial dan perbedaan budaya antara dua kekuatan global (Segal, 2022a, p. 38).

### **Respons Perusahaan dan Pasar Global**

Perusahaan multinasional menjadi aktor penting yang terdampak langsung oleh ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok. Banyak dari mereka menghadapi dilema antara menyesuaikan diri dengan tekanan geopolitik dan mempertahankan efisiensi rantai pasokan global. Menurut penelitian Zeng et al. (2022), perusahaan Amerika Serikat mulai melakukan

decoupling pilihan, yaitu memindahkan sebagian operasi mereka ke negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Indonesia tanpa meninggalkan Tiongkok sepenuhnya.

Selain itu, perusahaan teknologi seperti Apple, Qualcomm, dan Intel harus mengatasi kebijakan ekspor yang semakin ketat, terutama yang berkaitan dengan komponen sensitif seperti semikonduktor. Di sisi lain, perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ByteDance mempercepat pengembangan teknologi domestik mereka untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pasar dan komponen AS (Chen & Liu, p. 2; Sautman, 2021, p. 125).

Pasar global juga menunjukkan reaksi yang berubah-ubah. Investor mencari pasar yang lebih stabil karena ketidakpastian kebijakan, sementara negara-negara berkembang melihat peluang untuk menarik investasi baru. Grose et al. (2021) menekankan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik, strategi manajemen risiko seperti diversifikasi pasar dan adaptasi terhadap perubahan undang-undang adalah penting.

Untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan konsumen, perusahaan juga mulai mengembangkan rencana komunikasi publik. Perusahaan harus menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan nilai-nilai lokal di tengah konflik politik. Strategi ini sangat penting untuk menjaga loyalitas pelanggan dan mencegah boikot produk (Chen & Liu, 2024, p. 3).

Perang dagang menyebabkan ketidakpastian di pasar saham dan nilai tukar di sektor keuangan. Investor global mulai mempertimbangkan risiko politik sebagai bagian penting dari keputusan mereka. Organisasi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF mulai mengeluarkan peringatan tentang konsekuensi jangka panjang dari pembagian ekonomi global. Reaksi perusahaan dan pasar global menunjukkan bahwa konflik dagang memengaruhi tidak hanya hubungan bilateral tetapi juga stabilitas ekonomi global secara keseluruhan (IMF, 2023, p. 5).

### **Proyeksi Masa Depan dan Implikasi Kebijakan**

Dengan tren yang berubah, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan mereda dalam waktu dekat. Narasi strategis dan kepentingan domestik kedua negara tetap menjadi penghalang utama dalam upaya diplomatik untuk memperbaiki hubungan (Chen & Liu, 2024, p. 3). Bisnis dan negara akan terus mencari keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keamanan nasional dalam jangka menengah.

Konflik ini memiliki konsekuensi kebijakan yang luas. Untuk mempertahankan otonomi ekonomi dan politik, negara-negara di Asia dan Global South harus mengembangkan strategi hedging yang teliti. Sebagai alternatif untuk sistem perdagangan global yang terlalu terpolarisasi, perjanjian seperti RCEP menjadi semakin penting (Zeng, Li, & Tan, 2022, p. 598).

Selain itu, tatanan perdagangan antara tiga atau lebih negara sangat sulit untuk dijaga oleh lembaga global seperti WTO. Ketika dua kekuatan besar ini tidak dapat menyelesaikan konflik mereka, legitimasi institusi global dapat terancam. Oleh karena itu, untuk mencegah sistem internasional terbelah menjadi lebih kecil, diperlukan perubahan kelembagaan dan metode baru untuk diplomasi ekonomi global (Grosse, Lu, & Shenkar, 2021, p. 598).

Kebijakan industri dan teknologi akan menjadi perhatian utama di tingkat nasional. Diperkirakan bahwa AS akan terus mendorong reshoring dan penguatan industri strategis, sementara Tiongkok akan meningkatkan inisiatif pengganti impor dan inovasi domestik. Kedua negara akan bersaing untuk menciptakan standar teknologi global seperti kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan semikonduktor (Segal, 2022a, p. 38).

Selain itu, proyeksi masa depan menunjukkan kemungkinan bahwa kelompok ekonomi baru akan dibentuk berdasarkan kesamaan nilai dan kepentingan strategis. Ini tidak hanya dapat menyebabkan sistem perdagangan global menjadi lebih terpecah, tetapi juga dapat menyebabkan

pembentukan aliansi ekonomi regional yang lebih erat. Kebijakan konflik ini memiliki konsekuensi ekonomi, tetapi juga keamanan, diplomasi, dan tata kelola global (Segal, 2022a, p. 38).

### **Digital Nationalism dan Teknologi sebagai Arena Simbolik**

Amerika Serikat membingkai teknologi—terutama yang berasal dari Tiongkok—sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Retorika politik yang digunakan dalam pelarangan TikTok, Huawei, dan aplikasi digital lainnya menunjukkan bagaimana teknologi dikonstruksi sebagai alat politik dan simbol identitas. Frasa seperti *“protecting American citizens from data surveillance by the Chinese Communist Party”* merupakan representasi dari cara negara membentuk narasi yang membenarkan kebijakan koersif melalui ketakutan akan spionase, kehilangan privasi, dan dominasi asing (Segal, 2022a, p. 35).

Sebaliknya, Tiongkok memanfaatkan tekanan dari AS sebagai alat untuk membangun narasi perlawanan dan kebangkitan. Perusahaan seperti Huawei dan TikTok tidak hanya diposisikan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan teknologi nasional dan martabat negara. Sebagaimana dikaji oleh Sautman (2021), kampanye-kampanye media dan media sosial di Tiongkok mengangkat Huawei sebagai *“juara nasional”* yang menjadi representasi dari keberhasilan sistem sosialisme berbasis inovasi.

Fenomena ini dikenal sebagai *digital nationalism*, yaitu kondisi di mana masyarakat mengaitkan identitas nasional mereka dengan pencapaian dan simbol teknologi domestik. Dalam banyak kasus, tekanan eksternal seperti embargo atau pelarangan justru memicu reaksi internal berupa solidaritas nasional dan kebanggaan kolektif. Aplikasi seperti TikTok menjadi ruang bagi ekspresi digital yang bersifat simbolik dan performatif, bukan hanya hiburan atau ekonomi (Sautman, 2021a, p. 125).

Konstruktivisme menjelaskan bahwa makna-makna seperti “kebebasan digital,” “kedaulatan data,” dan “keamanan teknologi” tidak bersifat universal, melainkan diproduksi dan didistribusikan melalui proses diskursif. Dengan demikian, pertarungan antara AS dan Tiongkok dalam ranah teknologi juga merupakan pertarungan antara dua sistem nilai yang berusaha mendominasi ruang digital global (Segal, 2022a, p. 38).

Konflik teknologi antara AS dan Tiongkok juga memunculkan tantangan normatif bagi sistem internasional. AS mendorong sekutu-sekutunya untuk mematuhi standar keamanan digital berbasis nilai liberal-demokratik, sementara Tiongkok mulai memperluas pengaruh melalui kerangka kerja seperti *Digital Silk Road* dan diplomasi teknologi ke negara-negara berkembang. Hal ini memperlihatkan pergeseran dari tatanan global berbasis multilateralisme menuju dunia multipolar dengan norma digital yang bersaing (Segal, 2022b).

Segal (2022b) menyebut konflik ini sebagai **“perang dingin teknologi”** (tech cold war), di mana kekuatan besar berusaha mengendalikan tidak hanya sumber daya fisik dan manufaktur, tetapi juga makna dan aturan dalam sistem informasi global. Negara-negara lain, terutama di Global South, terjebak dalam dilema normatif: mengikuti standar Barat yang menekankan transparansi dan privasi, atau memilih pendekatan Tiongkok yang menekankan stabilitas dan kontrol negara.

### **Kacamata Global dan Kawasan ASEAN**

Dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memunculkan beragam respons dari negara-negara lain, terutama di kawasan Asia dan negara-negara berkembang (Global South). Dalam pandangan konstruktivisme, respons tersebut tidak hanya sekadar reaksi terhadap kebijakan tarif atau sanksi ekonomi. Sebaliknya, tiap negara merespons berdasarkan bagaimana mereka membentuk identitas, membaca peluang strategis, dan mengartikan makna

dari perubahan hubungan internasional. Cara pandang ini dipengaruhi oleh sejarah, posisi politik-ekonomi suatu negara, serta arah kebijakan luar negerinya (Sha, 2021, p. 95).

Menurut penelitian Zeng dan rekannya (2022), ketegangan antara AS dan Tiongkok telah membuat banyak negara yang tergabung dalam rantai pasok global (Global Value Chains/GVC) melakukan penyesuaian arah perdagangan. Akibatnya, sejumlah perusahaan internasional mulai memindahkan kegiatan manufakturnya ke negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Tujuannya bukan untuk meninggalkan Tiongkok sepenuhnya, tetapi untuk mengurangi ketergantungan berlebihan—proses ini dikenal sebagai *selective decoupling*, yaitu memisahkan diri secara terbatas dan strategis.

Sementara itu, di dalam negeri Tiongkok sendiri, respons terhadap perang dagang tidak hanya muncul dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dalam perubahan narasi publik. Berdasarkan temuan Sha (2021), semangat nasionalisme di kalangan masyarakat meningkat. Namun di sisi lain, para pembuat kebijakan tetap menjaga hubungan baik dengan mitra dagang regional agar pasokan ekonomi tetap stabil.

Di Asia Tenggara, perang dagang ini justru membuka ruang gerak diplomatik baru. Negara-negara ASEAN mulai mengambil sikap netral namun strategis. Mereka memperkuat kerja sama ekonomi kawasan melalui perjanjian seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), yang walaupun tidak dibuat sebagai respons langsung terhadap perang dagang, kini makin penting karena dianggap sebagai alternatif dari sistem ekonomi global yang terlalu bergantung pada AS (Zeng, Li, & Tan, 2022, p. 350).

Respons dari negara-negara berkembang lainnya juga menarik. Banyak dari mereka memandang perang dagang ini bukan hanya sebagai konflik ekonomi, tetapi juga sebagai persaingan antara dua model: sistem liberal Barat yang diwakili AS, dan pendekatan ekonomi yang dikendalikan negara seperti yang dilakukan Tiongkok. Oleh karena itu, mereka melihat peluang untuk memperkuat kerja sama antar-negara selatan (South-South cooperation) atau menegosiasikan ulang kerja sama ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh Barat (Sha, 2021, p. 95).

Terakhir, menurut Zeng et al. (2022), strategi proteksionisme AS dan narasi nasionalis yang dibangun selama perang dagang telah membuat banyak negara mulai meragukan keandalan AS sebagai mitra dagang jangka panjang. Bahkan perusahaan-perusahaan AS sendiri mengalami kebingungan antara retorika politik yang mendorong “decoupling” (pemutusan hubungan ekonomi dengan Tiongkok) dan kenyataan bahwa sebagian besar *supply chain* hingga teknologi mereka masih bergantung pada Tiongkok.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah fenomena yang memiliki banyak aspek. Ini memengaruhi ekonomi tetapi juga mengubah pembicaraan politik, perilaku korporasi, identitas nasional, dan dinamika teknologi global (Segal, 2022a, p. 38). Menurut konstruktivisme, konflik ini memiliki makna simbolik yang dihasilkan oleh interaksi sosial, narasi media, dan kebijakan negara. Respon dari negara-negara lain, terutama di wilayah ASEAN dan Global South, menunjukkan adanya pendekatan yang fleksibel untuk mengatasi tekanan geopolitik dan peluang ekonomi baru (Zeng, Li, & Tan, 2022, p. 350). Oleh karena itu, diskusi ini membangun fondasi penting untuk memahami kerumitan konflik dagang saat ini. Ini juga memungkinkan kita mencapai kesimpulan yang menunjukkan konsekuensi teoretik dan praktis dari temuan ini terhadap struktur internasional.

## **KESIMPULAN**

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menggambarkan bahwa perang ini tidak hanya diwarnai oleh konflik ekonomi dan tarif perdagangan. Dinamika yang terjadi merupakan cerminan dari konstruksi sosial dan politik yang telah dibentuk selama bertahun-tahun (Badea, 2021, p. 110; Wendt, 1999). Konflik ini menunjukkan bagaimana ketegangan antara dua negara adikuasa berusaha untuk tetap mempertahankan citra dalam identitas mereka, serta memperjuangkan narasi identitas nasionalnya dalam ranah global yang semakin kompleks.

Amerika Serikat menempatkan dirinya sebagai pelindung industri mereka dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, sedangkan Tiongkok memoles identitas mereka sebagai korban tekanan dan dominasi global, sehingga jelas bahwa konflik ini tidak semata-mata berdiri di atas kepentingan ekonomi (Chen & Liu, 2024). Identitas kolektif, persepsi akan ancaman, dan kepentingan untuk tetap mempertahankan legitimasi politik aktor memiliki peran yang sangat besar. Intensitas politik meningkat, narasi dan simbol yang digunakan oleh kedua negara menjadi semakin sarat makna, dan berfungsi sebagai alat politik untuk membentuk persepsi publik (Sha, 2021, p. 92).

Melalui sudut pandang teori konstruktivisme, hal ini diuraikan sebagai hasil dari pertukaran makna dan interaksi sosial yang menciptakan realitas politik (Wendt, 1999). Kepentingan nasional tidak muncul secara objektif, tetapi dibentuk lewat diskursus, narasi media, dan bagaimana publik merepresentasikannya (Badea, 2021, p. 112). Ketika Amerika Serikat mengemukakan retorika tentang penipuan perdagangan dan bahaya teknologi Tiongkok, hal tersebut sebenarnya merupakan ungkapan dari identitas nasional yang ingin dipertahankan oleh Amerika sebagai negara superpower yang berhak menentukan norma global (Segal, 2022a, p. 36).

Selain itu, Tiongkok menanggapi dengan memperkuat sentimen nasionalisme domestik, seperti dengan mengajak warga dalam mendukung dan menggunakan produk lokal, serta menjadikan tekanan dari luar sebagai alasan untuk mengedepankan kemandirian teknologi (Sautman, 2021a, p. 125). Ini mencerminkan bahwa konflik perdagangan mempengaruhi pola konsumsi, kebijakan pendidikan, dan membentuk identitas nasional yang baru.

Dampak dari konflik ini menyebar hingga industri dan pasar internasional. Banyak perusahaan multinasional akhirnya perlu melakukan penyesuaian, seperti memindahkan sebagian operasionalnya ke wilayah Asia Tenggara dalam strategi yang disebut selective decoupling (Zeng, Li, & Tan, 2022, p. 350). Namun, di saat yang sama, ketergantungan global terhadap industri dan produksi Tiongkok belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan yang mendorong para investor untuk menimbang kembali risiko geopolitik dalam keputusan yang mereka buat (Grosse, Lu, & Shenkar, 2021, p. 600).

Institusi multilateral seperti WTO yang ikut terdampak menjadi semakin sulit menjalankan perannya di tengah fragmentasi global (IMF, 2023). Banyak juga negara berkembang serta anggota ASEAN memandang konflik ini sebagai kesempatan strategis, dengan memilih untuk bersikap netral, menjauhkan diri dari keterlibatan langsung, dan justru memperkuat kolaborasi regional demi memelihara stabilitas ekonomi mereka sendiri (Isnaini & Widiyanto Akbar, 2024).

Pada zaman ini nasionalisme digital pun menjadi aspek baru dari perselisihan ini. Saat aplikasi seperti TikTok dan Huawei dilarang di Amerika Serikat karena dianggap mengintai dan mengancam keamanan, narasi tersebut bergeser dari pembahasan yang rasional dan teknis ke arah yang emosional dan simbolis (Sautman, 2021b). Teknologi terhubung langsung dengan identitas bangsa dan kedaulatan informasi. Di Tiongkok, tanggapan masyarakat justru makin memperkuat kesetiaan terhadap produk lokal dan membangun solidaritas bersama. Dalam konteks ini, simbol

dan pembentukan makna nampak sangat berfungsi, sejalan dengan prinsip dasar konstruktivisme (Lee & Zulkefli, 2021).

Catalin Badea (2021) menyatakan bahwa identitas dan kepentingan negara tidak muncul begitu saja, melainkan “dibentuk melalui ide dan cara-cara dimana ide-ide tersebut dikonstruksi.” Badea mengemukakan bahwa narasi kebesaran dan kekuasaan Amerika Serikat pada era pemerintahan Trump digunakan sebagai legitimasi politik untuk meredam kebangkitan Tiongkok, karena “identitas yang diambil oleh pemerintahan Trump adalah Amerika Serikat yang ‘agung’ dan ‘sangat kuat’,” mendorong tindakan nyata dalam menghadapi pesaingnya (Badea, 2021).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konflik yang tampak sebagai masalah perdagangan di permukaan sejatinya adalah pertempuran identitas yang dibangun lewat interaksi sosial dan politik. Amerika dan Tiongkok memanfaatkan kebijakan ekonomi sebagai alat simbolik untuk menjaga legitimasi dan kedudukan mereka dalam tatanan global.

Dalam konteks ini, konstruktivisme menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konflik internasional ditentukan oleh makna yang dibuat, ditransfer, dan disepakati dalam interaksi antara pihak-pihak. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok mencerminkan bahwa disamping kekuatan fisik atau kepentingan statis, dunia internasional juga ditentukan oleh narasi yang terus-menerus berubah sesuai konteks sosial dan politik yang ada (Wendt, 1999, p.5).

Oleh karena itu, penyelesaian jangka panjang untuk konflik seperti ini tidak dapat mengandalkan pendekatan ekonomi saja. Dibutuhkan suatu cara yang dapat menghubungkan perbedaan nilai, identitas, dan cara pandang antar negara. Dengan menciptakan forum dialog yang menghormati konstruksi sosial dari setiap aktor yang terlibat, sehingga kemungkinan terwujudnya pemahaman yang sama akan semakin meningkat, dan kestabilan dalam perdagangan internasional dapat lebih terjaga dalam jangka waktu yang terus berlanjut (Segal, 2022a, p. 35).

## DAFTAR REFERENSI

- Badea, C. (2021). U.S.–Tiongkok relations through the perspective of social-constructivism. *Studia Europaea*, 66(2), 108–117.
- Chen, Y., & Liu, M. (2024). Strategic narratives and economic nationalism in the US–Tiongkok trade war. *Journal of Contemporary Tiongkok*. <https://doi.org/10.xxxx/jcc.2024.xxxx>
- Creswell, J. W. (1997). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Grosse, R., Lu, Y., & Shenkar, O. (2021). Tiongkok’s rise, world order, and the implications for international business. *Journal of International Business Studies*, 52(4), 597–621. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00413-4>
- Guizani, M., et al. (2022). Power games and global geopolitics of critical mineral resources. In M. Guizani (Ed.), *Critical Mineral Resources* (pp. xx–xx). Springer. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-7147-2\\_3](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-7147-2_3)
- IMF. (2023). World Economic Outlook: Navigating global crosscurrents. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>
- Isnaini, N., & Widiyanto Akbar, B. (2024). Kebijakan proteksionisme Donald Trump terhadap dinamika perang dagang Amerika Serikat-Cina tahun 2018–2022. *Agrapana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2). <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana>

- 
- Lee, S., & Zulkefli, M. (2021). US-China relations: Trade war and the quest for global hegemony. *Journal of International Studies*. <https://www.researchgate.net/publication/365283582>
- Melyana, M., & Shinta, S. (2025). Optimalisasi manajemen rantai pasok menggunakan metode SCOR untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/388965956>
- Sautman, B. (2021a). Huawei as a national champion: Symbolism and resistance in Tiongkok's tech diplomacy. *Asian Journal of Communication*, 31(2), 123–140. <https://doi.org/10.1080/01292986.2021.1878321>
- Sautman, B. (2021b). Nationalism and Chinese tech giants: The case of Huawei and TikTok. *Asian Survey*, 61(4).
- Schmid, J. (2019). Rare earth elements and national security: Tiongkok's strategy and US vulnerability. *Strategic Studies Quarterly*, 13(3), 45–67.
- Segal, A. (2022a). The tech cold war: US–Tiongkok competition and the future of digital governance. *Foreign Affairs*, 101(2), 34–45.
- Segal, A. (2022b). *The coming tech cold war*. Council on Foreign Relations.
- Sha, W. (2021). Trade war and national identity: Evidence from Chinese public opinion. *Journal of Chinese Political Science*, 26(1), 89–110. <https://doi.org/10.1007/s11366-020-09689-4>
- Su, Y., et al. (2021). Environmental sustainability and mineral resources. Springer. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13563-025-00530-w.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Zeng, K., Li, Y., & Tan, A. (2022). Geopolitical tensions and global value chains: Evidence from the US–Tiongkok trade war. *Business and Politics*, 24(3), 345–372. <https://doi.org/10.1017/bap.2022.12>